

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil studi literatur dan validasi pakar, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan energi terbarukan di Kalimantan Timur dinilai melalui tiga dimensi utama, yaitu *socio-political acceptance*, *community acceptance*, dan *market acceptance*. Ketiga dimensi tersebut kemudian dioperasionalkan ke dalam 15 subkriteria yang mencerminkan aspek kebijakan, keadilan sosial, kepercayaan, serta kelayakan ekonomi dan pasar. Struktur kriteria dan subkriteria ini menunjukkan bahwa penerimaan energi terbarukan dipahami sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi. Dengan demikian, penerimaan energi terbarukan di Kalimantan Timur merupakan konstruksi sosio-teknis yang melibatkan interaksi antara aktor, institusi, dan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa evaluasi penerimaan energi terbarukan perlu melampaui pendekatan teknis dan ekonomi semata.
2. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa bobot kepentingan antar faktor penerimaan energi terbarukan tidak bersifat seimbang. Dimensi *community acceptance* memiliki bobot tertinggi dibandingkan *socio-political acceptance* dan *market acceptance*, yang mengindikasikan dominasi aspek sosial-lokal dalam membentuk penerimaan energi terbarukan di Kalimantan Timur. Pada tingkat subkriteria, faktor-faktor yang berkaitan dengan keadilan distribusi manfaat, manfaat ekonomi lokal, serta kejelasan dan konsistensi kebijakan memperoleh bobot relatif lebih tinggi dibandingkan faktor lainnya. Pola pembobotan ini mencerminkan bahwa para pakar menilai legitimasi sosial dan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai prasyarat utama keberhasilan transisi energi. Dengan demikian, hasil pembobotan memberikan gambaran kuantitatif mengenai struktur kepentingan relatif antar faktor penerimaan energi terbarukan.

3. Berdasarkan bobot global, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor prioritas utama dalam meningkatkan penerimaan energi terbarukan di Kalimantan Timur adalah keadilan distribusi manfaat dan risiko, manfaat ekonomi lokal, serta kejelasan dan konsistensi kebijakan. Faktor-faktor tersebut menempati peringkat teratas karena memiliki kontribusi terbesar terhadap bobot global dibandingkan subkriteria lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan energi terbarukan akan sulit tercapai apabila masyarakat lokal tidak merasakan manfaat yang adil dan konkret dari proyek energi terbarukan. Selain itu, kepastian kebijakan dan koordinasi kelembagaan tetap menjadi prasyarat penting untuk menopang dimensi sosial dan pasar. Oleh karena itu, strategi peningkatan penerimaan energi terbarukan perlu difokuskan pada penguatan keadilan sosial, manfaat lokal, dan kepastian tata kelola secara simultan.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah Kalimantan Timur disarankan untuk memprioritaskan kebijakan energi terbarukan yang menekankan keadilan distribusi manfaat dan risiko bagi masyarakat lokal. Perumusan kebijakan energi terbarukan perlu secara eksplisit mengaitkan pengembangan proyek dengan penciptaan manfaat ekonomi lokal, seperti lapangan kerja, peluang usaha, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu, kejelasan dan konsistensi kebijakan harus diperkuat melalui penyelarasan dokumen perencanaan energi daerah dengan kebijakan nasional agar tercipta kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pendekatan kebijakan yang berorientasi pada legitimasi sosial ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap agenda transisi energi. Dengan demikian, penerimaan energi terbarukan dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan dan inklusif.

Bagi pengembang proyek dan pelaku usaha energi terbarukan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya membangun strategi keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan proyek. Praktik partisipasi yang bermakna dan transparan perlu diterapkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat lokal terhadap pengembang dan pemerintah. Di sisi lain, lembaga keuangan dan investor diharapkan tidak hanya

mempertimbangkan kelayakan ekonomi proyek, tetapi juga aspek sosial dan institusional yang memengaruhi keberlanjutan jangka panjang investasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem energi terbarukan yang diterima secara sosial. Pendekatan kolaboratif ini akan membantu mengurangi resistensi sosial dan risiko non-teknis proyek.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan AHP ini dengan melibatkan jumlah pakar yang lebih luas dan lintas wilayah guna membandingkan pola prioritas penerimaan energi terbarukan antar daerah. Selain itu, integrasi metode AHP dengan pendekatan kualitatif mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai dinamika penerimaan sosial di tingkat lokal. Penelitian lanjutan juga dapat mengombinasikan pendekatan MCDM dengan analisis kebijakan untuk mengevaluasi dampak implementasi rekomendasi prioritas yang dihasilkan. Dengan demikian, kajian penerimaan energi terbarukan tidak hanya berhenti pada penentuan prioritas, tetapi juga mampu menilai efektivitas kebijakan secara longitudinal. Pendekatan ini akan memperkaya kontribusi akademik dan meningkatkan relevansi praktis penelitian di bidang transisi energi.